

## PUBLIKASI KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024



Dr. Bambang Setia Aji, S. I., MBA

DKP Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fungsi yang melekat yaitu Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan ; dan Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dengan ini disampaikan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2024, sebagai berikut:

### 1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan distribusi dan cadangan pangan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang distribusi dan cadangan pangan melaksanakan kegiatan :

#### 1. Sub Koordinator Cadangan Pangan

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Cpdp) Kabupaten Bogor Tahun 2024

Regulasi tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antara lain (1). Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (3). Peraturan Presiden No:125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, (4). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No: 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor:6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.

Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (CPPD), berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (CPPD):

- Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.
- Penyelenggaraan Cadangan Pangan daerah bertujuan untuk menanggulangi krisis pangan dan/atau rawan pangan.
- Bantuan yang diberikan yaitu 250 gram/hari/jumlah yang dibantu paling lama 60 hari
- Sasaran Penyelenggaraan cadangan pangan daerah adalah masyarakat yang mengalami, Kekurangan Pangan dan/atau krisis pangan, Gejolak Pangan, Bencana alam dan Non Alam, Bencana Sosial dan Keadaan Darurat.



Dinas Ketahanan Pangan telah menyalurkan bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah samapai bulan November sebanyak 79.967 Kg, dan rencana penyaluran tahap 4 sebanyak 14.485 Kg (Kemungkinan akan ada pembahan). dengan rincian sebagai beriku:

a. Tahap Pertama

Stok Januari 2024					317.069,22
No	Tanggal Penyaluran	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Penyaluran (Kg)
1	Selasa, 20 Februari 2024	Parung	7	24	310,0
		Tajurhalang	3	11	130,0
		Bojonggede	7	30	270,0
		Cibinong	12	36	405,0
		Kemang	20	64	660,0
2	Rabu, 21 Februari 2024	Cigombong	24	78	617,5
		Cijeruk	22	94	940,0
3	Kamis, 22 Februari 2024	Sukamakmur	59	207	1.620,0
4	Jumat, 23 Februari 2024	Babakan Madang	50	204	1.877,5
5	Senin, 26 Februari 2024	Nanggung	202	783	7.662,5
		Leuwiliang	25	98	980,0
		Ciampea	7	34	455,0
		Cibungbulang	15	50	505,0
		Cigudeg	6	29	400,0
6	Selasa, 27 Februari 2024	Dramaga	8	24	300,0
		Megamendung	27	97	727,5
		Ciomas	1.294	4.760	25.332,5
7	Rabu, 28 Februari 2024	Jonggol	35	99	1.182,5
8	Kamis, 29 Februari 2024	Caringin	53	198	2.480,0
9	Kamis, 14 Maret 2024	Ciomas	600	2.270	11.350,0
10	Jumat, 15 Maret 2024	Jonggol	62	182	1.630,0
<b>Total</b>			<b>2.528</b>	<b>9.372</b>	<b>59.835,0</b>
<b>Stok Akhir Maret</b>					<b>257.234,22</b>

b. Tahap Kedua

No	Tanggal Penyaluran	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Penyaluran (Kg)
1	Senin, 24 Juni 2024	Ciampea	5	17	170,0
		Pamijahan	37	117	1.107,5
		Ciomas	1	3	45,0
2	Selasa, 25 Juni 2024	Jonggol	2	6	45,0
		Sukamakmur	53	190	90,0
3	Rabu, 26 Juni 2024	Cijeruk	11	42	505,0
		Caringin	46	107	1.557,5
		Cigombong	23	250	275,0
4	Kamis, 27 Juni 2024	Babakan Madang	6	27	202,5
		Bojonggede	2	7	105,0
		Cibinong	113	190	1.580,0
		Sukaraja	372	1.325	3.315,0
<b>Total</b>					
<b>Stok Akhir Juni</b>					<b>421.086,72</b>
<b>Total Penyaluran CPPD Semester Pertama 75.182,5 Kg</b>					

c. Penyaluran Tahap Tiga

No	Tanggal Penyaluran	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Penyaluran (Kg)
1	Senin, 7 Oktober 2024	Babakan Madang	4	18	135,0
		Cibinong	7	26	195,0
		Kemang	6	20	150,0
2	Selasa, 8 Oktober 2024	Cigudeg	5	23	172,5
		Jasinga	15	44	330,0
		Cibungbulang	21	77	577,5
		Leuwiliang	5	17	127,5
3	Rabu, 9 Oktober 2024	Cijeruk	16	69	517,5
		Caringin	14	52	390,0
4	Kamis, 10 Oktober 2024	Megamendung	64	232	1.740,0
		Ciomas	6	15	112,5
5	Jumat, 11 Oktober 2024	Jonggol	11	22	165,0
		Sukamakmur	6	23	172,5
<b>Total</b>			<b>180</b>	<b>638</b>	<b>4.785</b>
<b>Stok Akhir Oktober</b>					<b>316.301,72</b>

d. Rencana Penyaluran tahap 4 (Kemungkinan ada Penambahan)

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Rencana Penyaluran (kg)
1	Jonggol	1	1	15
2	Cibinong	8	30	340
3	Kemang	61	210	2.225
4	Cibungbulang	7	23	275
5	Cigudeg	3	16	220
6	Jasinga	5	23	210
7	Cigombong	22	78	850
8	Caringin	77	332	3.225
9	Ciomas	123	462	2.095
10	Nanggung	36	107	1.070
11	Sukamkmur	35	150	1.500
12	Bojonggede	22	93	930
13	Cijeruk	17	78	585
14	Megamendung	32	118	885
<b>Jumat</b>		<b>449</b>	<b>1.721</b>	<b>14.485</b>

2. Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan

Jaga Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah Keliling (GPM LINK) Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga perseorangan.



## Launching Saung Inflasi

Dinas Ketahanan Pangan Luncurkan Saung Inflasi, Jaga Stabilitas Pangan di Bumi Tegar Beriman



Luncurkan saung inflasi yang berlokasi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, saung inflasi ini dibangun bukti komitmen Pemkab Bogor dalam

mengoptimalkan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor serta sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pangan terutama pangan beras. Peluncuran saung inflasi ini dilakukan langsung oleh Pj. Bupati

Bogor, Bachril Bakri didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, dan Plt. Kepala DKP Kabupaten Bogor.

saung inflasi ini terdiri dari lima kios inflasi yakni satu di Kantor DKP Kabupaten Bogor dan lainnya tersebar di beberapa kecamatan yang dikelola langsung oleh para Kelompok Tani yakni dua di Bojong Kulur Kecamatan Cileungsi, satu di Kecamatan Ciomas, dan satu di Kecamatan Dramaga.



Melalui kios pangan ingin menjamin baik stok pangan dan harga pangan bisa terjaga dan terkendalkan dengan baik.

Kios atau saung inflasi ini adalah reborn atau lahir kembali dari toko tani Indonesia, jadi memang sudah ada sebelumnya, hanya memang kita hidupkan lebih masif lagi. Sementara di urban

farming ini ada beraneka benih, bibit, pupuk organik, ada polybag juga peralatan perkebunan dan ada budidaya maggot.

## 2. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi penyelenggaraan fasilitasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang ketersediaan dan kerawanan pangan melaksanakan kegiatan :

1. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan

## 1. Pertanian Keluarga



Kegiatan PK merupakan kegiatan bantuan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan untuk peningkatan status daerah rentan pangan menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah tahan

pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan pangan. Kegiatan pertanian ini dikelola secara bersama-sama oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani.

Pada tahun 2024, memberikan bantuan kepada 2 kelompok tani kecamatan Leuwisadeng dan Cijeruk dengan bantuan untuk masing-masing berupa 15 bungkus benih cabai keriting, 20 Kg fungisida, 20 botol insektisida, 15 bungkus kapur pertanian, 10 roll mulsa plastik, dan 8 bungkus NPK.

## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)



Kegiatan PKH merupakan kegiatan bantuan terhadap masyarakat dalam bidang bantuan peralatan dan bahan bertani untuk ditanam di lahan pekarangan rumah, sebagai pemanfaatan lahan pekarangan. Selain pemberian bantuan, dilakukan juga kegiatan bimbingan teknis yang

meliputi pemberian materi mengenai cara penanaman yang baik, cara memanfaatkan bahan-bahan di sekitar sebagai kompos, cara mengenali hama dan penyakit serta penanggulangannya, cara merawat tanaman dan waktu yang dibutuhkan hingga masa panen.

bantuan ke 2 kecamatan Rancabungur dan kecamatan Ciomas, yang berjumlah masing-masing 2 desa. Kecamatan Rancabungur terdiri dari: desa Cimulang dan Desa Pasirgaok, di Kecamatan Ciomas terdiri dari: desa Sukaharja dan desa Mekarjaya. Bantuan untuk setiap desa berjumlah 25 KK. Total keseluruhan yang diberikan bantuan sebanyak 100 KK. Bantuan berupa 1 bungkus benih cabai keriting, 1 bungkus benih cabai rawit, 1 bungkus benih kangkung, 1 botol EM4, 20 kg kompos dan 1 kg polybag per KK.

## 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya



Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan yang tercermin dari tersedianya cadangan pangan masyarakat, meningkatkan kualitas produksi beras dikelompok tani serta meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya kelompok tani penerima manfaat. Maka Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi infrastruktur

berupa Rice Milling Unit (RMU) dan Lumbung Pangan Masyarakat (Leuit).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah membangun Rumah "Rice Milling Unit" (RMU) sebanyak 4 unit yang bertujuan sebagai sarana pendukung pengolahan (penggilingan) Gabah menjadi Beras. Bangunan RMU tersebut berada di Kecamatan Tanjungsari, Cariu, Cigombong dan Pamijahan. Lokasi bangunan RMU ini berada di kelompok tani Saluyu II desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari, kelompok Mulya Sejahtera Cahaya Tani desa Pasanggrahan Kecamatan Cariu, kelompok tani Maju Bersama desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong dan kelompok Subur Tani desa Cibunian kecamatan Pamijahan.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah



membangun Leuit sebanyak 7 unit di Kecamatan Pamijahan. Bantuan leuit ini berlokasi di dua tempat yaitu Kelompok Subur Tani Desa Cibunian sebanyak 4 unit dan Kelompok Asuh Tani Jaya Desa Purwabakti sebanyak 3 unit.

Leuit atau lumbung padi merupakan wadah untuk menyimpan padi hasil panen warga. Bentuk leuit biasanya seperti rumah panggung namun hanya memiliki satu pintu pada tengah bangunan karena mempermudah untuk keluar masuk padi yang dikemas karungan.

### Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah suatu tabel yang terdiri atas kolom-kolom yang memuat informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan pangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. NBM memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk dikonsumsi langsung oleh penduduk, dalam bentuk fisik (Kg/Kapita/Tahun atau Gram/Kapita/Hari) maupun dalam bentuk zat gizi (energi, protein dan lemak) per kapita per hari.

Dalam NBM diperoleh berbagai informasi, baik mengenai suplai dan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan di suatu wilayah/daerah, maupun jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dan informasi tersebut dapat dijadikan salah satu landasan perencanaan setiap komoditas, mengevaluasi pelaksanaan dan kebijakan program.



### Tahapan Penyusunan Neraca Bahan makanan (NBM)

- **Pertemuan Awal**  
Mengawali pertemuan untuk menginisiasi dan menyepakati melakukan kegiatan Neraca Bahan Makanan untuk Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bogor. Kesepakatan yang ditetapkan dalam Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), yaitu Maksud tujuan dan sasaran tentang penyusunan kegiatan, Gambaran umum atau potensi tentang ketersediaan pangan yang sudah ada berdasarkan data-data yang sudah ada, Memilih metode atau cara yang digunakan dalam penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- **Pertemuan Perkembangan**  
Mengadakan Pertemuan Focus Group Discasion (FGD) Tim membahas tentang hal-hal penyusunan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan ketersediaan pangan pokok yang meliputi, Bagaimana pasokan pangan pokok masuk ke Kabupaten Bogor dari wilayah-wilayah mana saja dan kapasitasnya berapa, Bagaimana alur dari rantai pasokan pangan ke Kabupaten Bogor dan pemetaannya bagaimana, Memasukan data-data penyedia pangan yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor Memasukan data-data penyedia pangan yang masuk ke Wilayah Kabupaten Bogor
- **Pertemuan Akhir**  
Rapat Finalisasi data data dari setiap SKPD yang terkait dalam tim Neraca Bahan Makanan (NBM).  
Berdasarkan hasil Neraca Bahan Makanan Tahun 2024 (Produksi ATAP 2023) dapat disimpulkan, sebagai Ketersediaan energi di Kabupaten Bogor adalah sebesar 2,418 kkal/kap/hari di atas ketersediaan energi ideal 2,400 kkal/kap/hari (rekomendasi Widya Nasional Pangan dan Gizi), Ketersediaan protein di Kabupaten Bogor adalah sebesar 89,73 gram/kap/hari berada di atas ketersediaan protein ideal 63 gram/kap/hari (rekomendasi Widya Nasional Pangan dan Gizi), Capaian Skor PPH ketersediaan pangan Kabupaten Bogor adalah sebesar 86,24 belum mencapai skor ideal (100). Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor belum beragam, Kelompok bahan pangan yang belum mencapai skor ideal adalah kelompok umbi-umbian, biji dan buah berminyak, sayur dan buah.

2. Sub Koordinator Kerawanan Pangan  
 1. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP)



Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan berupaya untuk melakukan intervensi terhadap wilayah rentan pangan yang terkena bencana melalui kegiatan penyaluran bantuan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP) pasca bencana. Bantuan PDRP

pasca bencana diberikan kepada masyarakat di daerah rentan rawan pangan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang mengalami bencana, yang datanya berasal dari laporan Pemerintahan Desa atau Kecamatan setempat maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

Secara total, bantuan PDRP adalah sebanyak 900 paket untuk 900 KK yang dibagi menjadi 2 tahap masing – masing 450 KK. Adapun bantuan tiap paketnya yang diberikan berupa: Abon sapi (1 pack @ 100 gram), Kernet sapi (1 kaleng @ 340 gram), Minyak goreng (1 buah @ 2 liter), Sarden (2 kaleng @ 155 gram), Tepung terigu (2 pack @ 1 kg)

Lokus penerima bantuan PDRP tahun 2024 tahap 1 tersebar di 28 desa 6 kecamatan, yaitu:

No	Kecamatan	Desa
1	Cijeruk	Tanjungsari, Menteng, Cipelang, Cibalung, Cijeruk, Palasari, Cipicung
2	Sukamakmur	Sukamakmur, Sukawang, Sirnajaya, Pabuaran, Sukaresmi
3	Babakan Madang	Karang Tengah, Sentul
4	Megamendung	Cipayung Girang, Sukaresmi, Kuta, Megamendung, Sukamahi, Gadog, Sukamaju
5	Ciomas	Sukaharja, Mekarjaya, Kotabatu, Kalongliud,
6	Nanggung	Parakanmuncang, Hambaro, Pangkaljaya

2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)



Pemberian Makanan Tambahan adalah program intervensi bagi balita yang menderita kurang gizi, tujuannya untuk meningkatkan status gizi serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak. Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor memberikan

bantuan berupa PMT Susu dan PMT Protein Hewani (Prohe).

1. PMT Susu diberikan selama 3 bulan kepada balita yang berada di Kecamatan Rumpin yang terdiri dari 5 desa sebanyak total 150 balita, yaitu: Desa Cidokom sebanyak 30 paket, Gobang sebanyak 30 paket, Cibodas sebanyak 30 paket, Kertajaya sebanyak 30 paket dan Tamansari sebanyak 30 paket. Jenis bantuan per paket yang diberikan, berupa Susu formula balita 2 dus/balita/bulan, Biskuit 2 pack/balita/bulan
2. PMT Prohe diberikan selama 6 bulan dengan total bantuan sebanyak 120 paket untuk 120 balita yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Cijeruk: Desa Cipelang sebanyak 30 paket, Desa Tanjungsari sebanyak 20 paket, Desa Warung Menteng sebanyak 20 paket
- b. Kecamatan Tamansari: Desa Sukajadi sebanyak 25 paket, Desa Sukajaya sebanyak 25 paket

Bantuan PMT Prohe per paket berupa: Ayam frozen 1 ekor/balita/bulan, Susu UHT @200 ml 12 packs/balita/bulan, Telur Omega @10 butir 2 packs/balita/bulan, Nugget Ayam @500 gram/balita/bulan

### 3. Food Waste



*Food waste (FW)* adalah ada makanan baik yang di dibuang dengan sengaja maupun tidak, mulai dari proses produksi hingga sampai pada konsumen, dan berakhir menjadi limbah makanan. Food Waste saat ini menjadi isu yang penting dan telah menjadi perhatian secara global. Limbah

makanan ini merupakan salah satu yang menjadi permasalahan ekonomi dan lingkungan paling menantang di abad ke-21. Sampah diproduksi sebanyak 13,7 Milyar ton setiap tahunnya secara global, hal ini setara dengan 1/3 pangan yang diproduksi untuk dikonsumsi penduduk dunia. Di Kabupaten Bogor jumlah food waste mencapai 77 Kg/kap/thn sama dengan 463 truk sampah/hari.

Berdasarkan fenomena dan urgensi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan selaku dinas yang memiliki tanggung jawab dalam Pengendalian dan Pengentasan Wilayah Rentan Rawan Pangan dan Gizi melakukan “Rangkaian Kegiatan Penanganan *Food Waste* di Kabupaten Bogor”, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya kepedulian, pengetahuan dan kemampuan dalam penanganan *food waste*. Rangkaian kegiatan penanganan *food waste* di Kabupaten Bogor antara lain :

1. Penerbitan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 500.1/210/DKP/2024 Tentang Gerakan Selamat Pangan
2. Penerbitan Buku Saku dan E-Book “Tips dan Trik Pemanfaatan Berlebih (FoodWaste) Link Buku saku Foodwaste”. [https://bit.ly/e-Book\\_BukuSakuFoodwaste\\_DKP\\_2024](https://bit.ly/e-Book_BukuSakuFoodwaste_DKP_2024)
3. Kerjasama pentahelix dengan perguruan tinggi terkait .
4. Sosialisasi secara massif Gerakan Selamatkan Pangan melalui :
5. Sosialisasi ke SKPD terkait, TP-PKK Kab Bogor dan Kader Ketahanan Pangan.
6. Sosialisasi Kelompok Penerima Manfaat PKH kolaborasi dengan mahasiswa PKL-GM IPB.
7. Publikasi Videotron dan Baliho
8. Publikasi di Lini Massa ( IG/ Website/Koran)

Melalui kegiatan tersebut Bupati Bogor mendapat apresiasi sebagai Kepala Daerah Yang Memiliki Komitmen Dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dari Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS RI.

### 4. Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat

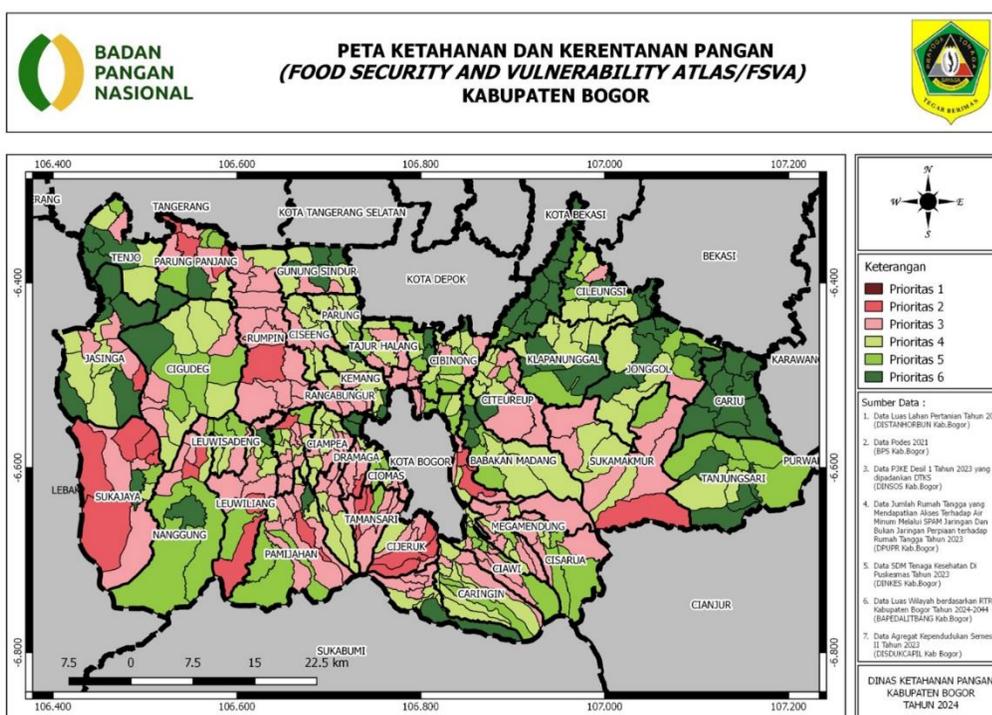
keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

FSVA disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Indikator untuk tingkat kabupaten terdiri dari:

1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk.
2. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.
3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.
4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.
5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga.
6. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Hasil FSVA Kabupaten Bogor Tahun 2024 secara komposit menunjukkan sebanyak 27 desa termasuk prioritas 2 (agak rentan rawan pangan) serta 138 desa dan 3 kelurahan termasuk prioritas 3 (rentan rawan pangan). Kerentanan wilayah desa/kelurahan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh:

1. Tingginya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
2. Rendahnya rasio sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; dan
3. Tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk.



### 3. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan melaksanakan kegiatan :

## 1. Sub Koordinator Penganekaragaman dan Promosi Pangan

### Edukasi Urban Farming di Taman B2SA Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan



Berbagai upaya gencar dilakukan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Tingkat Keluarga di Kabupaten Bogor, salah satunya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melalui Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan melaksanakan kegiatan Edukasi Urban Farming Kelas Edukasi Urban Farming terbuka untuk masyarakat, sepanjang Tahun 2024 ratusan masyarakat datang belajar di Taman B2SA, dari mulai ibu rumah tangga, PKK, Kelompok

Wanita Tani siswa siswa, karyawan maupun aktivis lingkungan adapun pilihan edukasi yang diberikan sesuai dengan minat peserta yaitu ;

1. Budidaya Sayuran di lahan pekarangan
2. Memelihara ayam petelur di pekarangan
3. Pembesaran Ikan Nila
4. Membuat Pupuk Organik Cair (POC) dan Pestisida Organik
5. Hidroponik
6. Pengolahan / Memperpanjang masa simpan dari panen hasil pekarangan seperti cabe kering, terong kering, daun bawang kering dan aneka jenis sayuran lainnya.
7. Budidaya Magot sebagai alat alternatif pakan ternak



Hasil pekarangan selain untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga sehingga mengurangi pengeluaran belanja harian juga dapat menambah pendapatan dengan menjual produk olahan hasil pekarangan Harapannya dengan sarana edukasi Urban farming di Dinas Ketahanan Pangan dapat menarik minat masyarakat dari berbagai lapisan untuk memanfaatkan lahan pekarangan dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan di rumah tangga dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

## 2. Sub Koordinator Konsumsi Pangan Penganekaragaman Pangan Lokal



yang baik dengan nilai gizi yang juga baik. Tentunya dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan pola konsumsi pangan yang ideal melalui pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang dan aman (B2SA) yang sudah gencar di sosialisasikan. Seperti konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, buah biji, berminyak, sayur dan buah. "Semakin beragam pola konsumsi pangan maka akan



percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan Rapat Koordinasi Rencana Kebutuhan Pangan Lokal yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, sementara Kabupaten Bogor memiliki sumber pangan lokal

semakin mendukung pencapaian skor PPH ideal di Kabupaten Bogor," Terlebih dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada tanggal 15 Agustus tahun 2024.

"Diharapkan dengan adanya rakor ini maka akan timbul pola pangan baru di Kabupaten Bogor yang tidak hanya melulu berorientasi pada beras. Rakor ini sebagai upaya untuk bagaimana kita menciptakan rencana aksilitas sektor di antaranya memastikan ketersediaan pangan lokal yang beragam, aksesibilitas pangan yang merata dan terjangkau setelah mendukung program perubahan konsep pangan yang B2SA,"

Oleh karena itu perencanaan yang matang adalah kebutuhan pangan lokal sangatlah penting guna menjamin ketersediaan pangan agar terwujud pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis kepada sumber daya pangan lokal yang ada di Kabupaten Bogor.

## 4. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan membawahi seksi Pengawasan Keamanann Pangan dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan salah satunya memiliki fungsi penyelenggaraan fasilitasi keamanan pangan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang keamanan pangan melaksanakan kegiatan :

## 1. Subkorinator Keamanann Pangan

Upaya Dkp Dalam Peningkatan Pengawasan Dan Pembinaan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan Di Kabupaten Bogor



Sistem pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui program kegiatan yang efisien dan berkelanjutan hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan produk pangan diperedaran adalah pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi.

Dengan kondisi geografis Indonesia, keterbatasan SDM pengawas, sarana peredaran, literasi keamanan

pangan yang masih kurang, serta produk pangan segar yang beragam dan mudah rusak maka diperlukan pengawasan keamanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta memastikan praktik adil perdagangan,” ungkap Anto selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan. “Dalam mewujudkan sistem pengawasan keamanan pangan daerah, maka penguatan simpul sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder dan juga instansi lainnya menjadi sangat penting dilakukan untuk menjaga dan memastikan setiap tahapan pangan memenuhi standar keamanan pangan, baik itu good farming practices, good handling practices, good distribution practices dan sebagainya sampai kepada tahap retailing nya.



“Kembali kami tekankan bahwa keamanan pangan adalah share responsibility yang merupakan urusan semua pihak disepanjang rantai pangan, baik itu pemerintah, pelaku usaha, distributor, pedagang, maupun konsumen. Setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam upaya pengendalian keamanan pangan. Prinsip keamanan pangan from farm to table perlu terus kita kampanyekan. If it is not safe, it is not food”

“Sebagai tindak lanjut, Dinas Ketahanan Pangan ditahun 2024 melalui bidang keamanan pangan ini telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan standar keamanan dan mutu pangan yang berorientasi kepada pelayanan dan peningkatan pengetahuan dan kualitas masyarakat terkait keamanan pangan, diantaranya adalah (1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;

Pada Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya: a).Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan standar penerapan penanganan yang baik bagi pelaku usaha yang pelaksanaannya di 6 Kecamatan dengan peserta kelompok tani dan juga pelaku UKM di Kabupaten Bogor; b).Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia; c). Pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan standar standar keamanan pangan bagi petugas pasar; d). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Tk. Distribusi meliputi pasar rakyat, retail modern dan sentra penjualan pangan segar; e).Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Tk. Produksi meliputi kelompok tani, pelaku usaha UKM dan pelaku utama pangan segar; Sedangkan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

a).pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan legalitas keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil/mikro yang pelaksanaannya di 4 Kecamatan dengan peserta kelompok tani; b). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan serta pendampingan di Tk. Produksi pada pelaku usaha kecil mikro di 6 kecamatan;c). Ditahun 2024 ini DKP telah mengeluarkan legalitas penjaminan keamanan pangan berupa sertifikasi prima 3 sebanyak 13 sertifikat untuk 13 komoditas sayuran.

## **2. Subkord Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Peran Tim Kelembagaan Dan Informasi Keamanan Pangan Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Di Kabupaten Bogor**



Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Penyelenggaraan keamanan pangan ini bertujuan untuk menjaga agar pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Tim Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan (KIKP) hadir dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan dan peningkatan pengetahuan dan kualitas masyarakat terkait keamanan pangan, diantaranya adalah Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, beberapa giat yang dilaksanakan adalah Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan yang difokuskan untuk desa/kelurahan stunting. Dari 435 desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Bogor, terdapat 114 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori stunting. Untuk tahun 2024, edukasi keamanan pangan dilaksanakan di 16 desa/kelurahan yang terindikasi stunting diantaranya adalah Desa Bendungan, Desa Sirna Galih Kecamatan Jonggol, Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari, Desa Bojonggede, Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede, Desa Dramaga, Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Desa Jampang Kecamatan Kemang, Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Desa Liga Mukti Kecamatan Klapanunggal, Desa Mekarsari, Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur, Desa Sirnagalih, Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari, Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas dan Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.

Selain untuk desa/kelurahan stunting, sosialisasi keamanan pangan juga dilakukan di 13 Sekolah Menengah Pertama di Kab. Bogor. Diantaranya SMPN 1 Tanjungsari, SMPN 1 Jonggol, SMPN 2 Jonggol, SMPN 2 Kemang, SMPN 1 Kemang, SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Klapanunggal, SMPN 1 Gunung Putri, SMPN 1 Rancabungur, SMPN 1 Tamansari, SMPN1 Dramaga, SMPN 1 Babakan Madang dan SMPN 2 Sukaraja

Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan tidak hanya untuk masyarakat tetapi kita laksanakan juga untuk Pelaku Usaha UMKM di Bidang Pangan Segar Asal Tumbuhan. Bimtek Keamanan Pangan dilaksanakan 1 angkatan dengan jumlah 30 Pelaku Usaha UMKM di Kab. Bogor. Bimtek Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Selain edukasi dan sosialisasi, untuk menguatkan kelembagaan keamanan pangan, Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang melibatkan instansi-instansi terkait di lingkungan Kabupaten Bogor juga dilaksanakan. Rapat Koordinasi JKPD dilakukan di Hotel Gerbera dengan peserta dari Dinas Ketahanan Pangan di Daerah Perbatasan. Rapat Koordinasi tersebut menitik beratkan kepada pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan keamanan pangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yang kemudian dirapatkan bersama untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah terkait keamanan pangan tersebut. Selain itu dibahas mengenai Perjanjian Kerjasama Terkait Keamanan Pangan di Daerah Perbatasan yang ruang lingkupnya akan diperluas menjadi Perjanjian Kerjasama Ketahanan Pangan.

Di tahun ini, perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta. Total kerjasama yang sudah dilaksanakan dengan wilayah perbatasan terkait keamanan pangan sudah mencapai 8 kerjasama. Selain 2 kabupaten/kota tersebut di atas, perjanjian kerjasama ini juga sudah dilaksanakan dengan Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bekasi. Selain melakukan kerjasama dengan instansi/dinas terkait di wilayah perbatasan, untuk menguatkan peran keamanan pangan di Kabupaten Bogor, dilaksanakan juga kerjasama dengan Institusi pendidikan yaitu Universitas Djuanda yang menitik beratkan kepada sains dan teknologi serta fasilitasi mahasiswa/i dalam program Praktek Kerja Lapang/Magang terkait pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor. Institusi lain yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Tohaga terkait pengawasan keamanan pangan di tingkat peredaran pasar tradisional.

Selain terlibat dengan penguatan kelembagaan keamanan pangan, Tim KIKP juga melaksanakan tugas lainnya yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor izin edar Registrasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK).

Upaya pemerintah untuk memberikan penjaminan dan legalitas keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha. Jenis perizinan untuk pangan segar yang beredar mencakup izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), izin edar Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), dan registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK). Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu menerbitkan registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlakuan istimewa diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemudahan berusaha. Kemudahan tersebut berupa pemberian izin di awal, dengan pemenuhan persyaratan teknis setelah izin diterbitkan. Kemudahan ini juga berlaku untuk perizinan bidang ketahanan pangan yaitu Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan oleh usaha mikro dan kecil (Registrasi PSAT- PDUK). Dalam registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi diantaranya adalah Surat Permohonan Pengajuan Registrasi, Keterangan informasi produk dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan.

Registrasi ini diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota yang dalam hal ini melekat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Penerbitan legalitas keamanan pangan yang merupakan penjaminan keamanan pangan untuk PSAT PDUK dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang dimulai sejak awal Tahun 2021 dengan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor selaku ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota.

Sampai dengan akhir November tahun 2024 ini, pelaku usaha yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor registrasi izin edar PSAT-PDUK adalah sebanyak 9 pelaku usaha dengan total jumlah nomor izin edar yang telah diterbitkan sebanyak 185 nomor izin edar. Selain itu, untuk menjaring pelaku-pelaku usaha PSAT agar mendaftarkan produknya supaya mendapatkan nomor registrasi izin edar PSAT-PDUK dilaksanakan sosialisasi

registrasi PSAT-PDUK sebanyak 5 kali yang dilaksanakan di 5 Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kabupaten Bogor (Cibinong, Dramaga, Gunung Putri, Cigudeg dan Caringin).

Selain memfasilitasi dalam pembuatan No. Registrasi PSAT-PDUK, kita juga melaksanakan temu usaha yang bertujuan menghubungkan Pelaku Usaha yang telah mengajukan No. Registrasi PSAT-PDUK dengan pihak retail sehingga bisa memperluas kemitraan.

### 3. UPT Pengujian Mutu Pangan Segar

UPT Pengujian Mutu Pangan Segar berdasarkan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2018, mempunyai Tugas Melaksanakan Teknis Operasional Pengujian Mutu Pangan Segar, yang meliputi 40 Kecamatan sebagai wilayah sasaran pengujiannya baik di tingkat produsen/petani maupun distributor/pedagang. Pengujian yang dilakukan yaitu terhadap cemaran kimia (Pestisida, Klorin, Formalin, boraks) yang terkandung di dalam Pangan Segar. Dimana dampak mengkonsumsi Pangan Segar yang tercemar bahan kimia tersebut dalam jangka panjang dapat menimbulkan kanker hati, kanker kandung kemih, kanker usus, dan penyakit lainnya.

UPT Pengujian Mutu Pangan Segar telah melakukan pengujian baik cemaran kimia maupun pengujian mutu sd bulan November 2024 sebanyak 343 kali dengan jumlah sampel 1.081 sampel yang terdiri dari berbagai komoditas yaitu beras, cabe merah, cabe rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, pakchoi, selada, terong, timun, asparagus dan lainnya. Untuk pengujian beras yaitu uji cemaran kimia (pestisida dan klorin) serta uji kelas mutunya, dimana UPT Pengujian Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk menguji/mengecek mutu dan keamanan pangan produk beras dari BULOG sebelum penyaluran untuk Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional di wilayah Kabupaten Bogor dan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang membutuhkan.

Pengujian klorin dan pestisida pada beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diambil sampelnya, tidak ditemukan/tidak terdeteksi adanya cemaran bahan kimia. Untuk uji mutu berasnya semua parameter (derajat sosoh, kadar air, butir menir, butir patah dan total butir beras lainnya) masuk dalam kategori kelas mutu Medium sesuai yang telah ditentukan dalam Perbadan No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Pada Saat Pengujian Beras Bantuan Pangan Di Gudang Bulog, Dramaga



Selain itu, UPT Pengujian Mutu Pangan Segar melaksanakan pengambilan sampel di pedagang pasar dalam rangka Penilaian Pasar Aman untuk dilanjutkan dengan pengujian cemaran kimia yaitu residu pestisida, Formalin dan boraks. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keamanan pangan segar di pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, agar bila dikonsumsi masyarakat Kabupaten Bogor aman, sesuai dengan amanat yang tercantum di Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu."

## Pengambilan sampel PSAT dan pengujian cemaran kimianya



Pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia tingkat Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, UPT PMPS juga mengadakan Demo Pengujian langsung kepada masyarakat terkait cemaran yang ditemui pada makanan yang sering di konsumsi oleh masyarakat pada umumnya, hal tersebut diharapkan bisa mengajak masyarakat agar lebih peduli dan menjadi perhatian dalam memilih pangan yang akan di konsumsi sehari hari.

Selama bulan November 2024, UPT Pengujian Mutu Pangan Segar turut serta dalam pengujian Anggur Shine Muscat yang sebelumnya ditemukan senyawa pestisida melebihi batas aman yang diizinkan di Negara Thailand. Shine Muscat merupakan jenis anggur berwarna hijau yang banyak ditemukan di Negara Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan serta di impor ke beberapa Negara di Asia. Anggur Shine Muscat di Negara Thailand banyak yang diimpor dari Negara Tiongkok dan terdeteksi senyawa pestisida yaitu klorpirifos. Senyawa ini dapat mengakibatkan efek samping yaitu keracunan, kerusakan syaraf pada janin, penurunan IQ dan memperlambat perkembangan anak. Dari seluruh sampel Anggur Shine Muscat yang diambil dari beberapa retail yang ada di Kabupaten Bogor didapatkan hasil bahwa sampel Anggur Shine Muscat yang dijual tidak terdeteksi cemaran pestisida yang melebihi batas aman, sehingga layak untuk dikonsumsi, hal ini juga diperkuat oleh hasil dari Laboratorium terakreditasi yang menyatakan tidak terdeteksinya residu cemaran kimia yang melebihi Batas Maksimum Residu (BMR).

Masih banyak lagi pengambilan sampel dan pengujian cemaran kimia produk pangan segar yang telah dilaksanakan oleh UPT Pengujian Mutu Pangan Segar Tahun 2024. Apa pun yang telah dikerjakan oleh UPT Pengujian Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan, tujuannya agar dengan mengkonsumsi pangan segar yang aman dan bergizi bisa menghasilkan masyarakat Kabupaten Bogor sehat, cerdas dan berkualitas.